

HARI JADI PROVINSI JAWA BARAT

MAKALAH

Disampaikan dalam Seminar
“Penentuan Hari Jadi Jawa Barat; sebuah Analisis Historis”
Diselenggarakan oleh Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang
Jawa Barat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
pada tanggal 13 Oktober 2010 di Hotel Horison.

oleh:

Mumuh Muhsin Z.



**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS PADJADJARAN
JATINANGOR
2010**

HARI JADI PROVINSI JAWA BARAT¹

Oleh

Mumuh Muhsin Z.²

Abstrak

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang pertama kali dibentuk oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Pembentukan itu terjadi pada tanggal 1 Januari 1926. Pada masa Pemerintahan Pendudukan Jepang, provinsi ini bubar karena Jepang membentuk sistem pemerintahannya sendiri yang bersifat militeristis. Dua hari setelah proklamasi kemerdekaan RI, yakni tanggal 19 Agustus 1945, pemerintah membentuk lagi pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Dari dua tanggal ini mana yang akan dipilih untuk diperingati sebagai hari lahir, bukan lagi persoalan sejarawan, tapi sangat bergantung pada pertimbangan politis.

Pendahuluan

Konon, satu-satunya pemerintahan provinsi di Indonesia yang belum memiliki hari jadi adalah Provinsi Jawa Barat. Bila kabar ini benar, tentu saja cukup mengagetkan. Betapa tidak, ini terjadi menimpa pada provinsi tertua, yang sejak pembentukannya (1925) hingga hari ini (2010) sudah memiliki 20 gubernur. Mengapa hal ini bisa terjadi? Padahal mengetahui hari lahir atau hari jadi, yang kemudian diperingati, itu cukup memiliki manfaat; sebagai *moment* untuk mengevaluasi, introspeksi, dan refleksi diri demi kebaikan di masa depan.

Kenyataan tersebut mendapat perhatian *Pikiran Rakyat* dan Dinas Pariwisata Jawa Barat, sehingga kedua lembaga tersebut berinisiatif mengadakan diskusi pada hari Selasa tanggal 3 November 2009 bertempat di Aula Pikiran Rakyat. Fokus perhatian

¹ Makalah disampaikan dalam seminar “Penentuan Hari Jadi Jawa Barat; sebuah Analisis Historis” yang diselenggarakan oleh Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 13 Oktober 2010 di Hotel Horison.

² Penulis adalah staf pengajar Prodi Ilmu Sejarah Fasa Unpad dan Ketua Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Jawa Barat.

diskusi adalah kapan waktu yang paling tepat untuk ditetapkan sebagai hari jadi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Perbincangan masalah tersebut ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Harian Umum *Pikiran Rakyat* pada 1 Juli 2010 melalui penyelenggaraan saresahan bertema “Ngaguar Titimangsa Jawa Barat” di Bappeda Jawa Barat. Pada diskusi yang pertama (3 November 2009) muncul dua pendapat pemilihan hari jadi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu tanggal 1 Januari 1926 dan tanggal 19 Agustus 1945. Pada diskusi yang kedua (1 Juli 2010), selain dua alternatif yang sudah dimulculkan pada diskusi sebelumnya, muncul alternatif ketiga yaitu tanggal 15 Juli 1950. Pada diskusi ketiga ini, yang diselenggarakan oleh Yayasan Masyarakat Sejarawan Indonesia berkerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tampaknya mengarah pada pengambilan sikap untuk menentukan satu pilihan di antara ketiga alternatif itu.

Pembentukan Provinsi Jawa Barat

Alternatif I: 1 Januari 1926

Jawa Barat sebagai nama identitas geografis sudah digunakan sejak abad ke-19. Meskipun belum diketahui persisnya kapan istilah tersebut muncul, tapi paling tidak, pada tahun 1879 sudah ada sebuah buku yang ditulis oleh S. Coolsma, berjudul *Twaalf Voorlezingen over West-Java; het Land, de Bewoners en de Arbeid der Nederlandche Zendingsvereeniging* (Rotterdam: D. van Sijn & Zoon, 1879).

Batas wilayah Jawa Barat saat itu adalah sebelah utara Sungai Losari dan sebelah selatan Sungai Citanduy. Jawa Barat dengan status administratif sebagai pemerintahan provinsi terjadi pada dekade kedua abad ke-20. Pembentukan pemerintahan provinsi Jawa Barat sebenarnya sebagai tindak lanjut dari *Bestuurshervormingswet* atau Undang-Undang Perubahan Pemerintahan (1922).

Provinsi yang pertama kali dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda adalah *Provincie West Java* (Provinsi Jawa Barat) pada tanggal 1 Januari 1926. Pembentukan provinsi ini dituangkan dalam *Staatsblad* (Lembaran Negara) Tahun 1925 Nomor 378 tanggal 14 Agustus. Kemudian menyusul dibentuk *Provincie Oost Java* (Provinsi Jawa

Timur) pada tahun 1928, dan *Provincie Midden Java* (Provinsi Jawa Tengah) tahun 1929.

Provinsi Jawa Barat pada awal pembentukannya meliputi lima keresidenan dan enam kotapraja (*stadsgemeente*). Kelima keresidenan itu adalah Banten, Batavia (Jakarta), Buitenzorg (Bogor), Priangan (*Preanger Regentschappen*), dan Cirebon. Keenam kotapraja itu adalah: Batavia, Meester Cornelis, Buitenzorg, Bandung, Cirebon, dan Sukabumi. Dalam perkembangan selanjutnya, Batavia keluar dari Provinsi Jawa Barat, disusul oleh Banten pada tahun 2000.

Luas wilayah Jawa Barat pada masa itu kira-kira sama dengan bekas wilayah Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda saat itu menerapkan sistem pemerintahan “federal” yang memberikan otonomi penuh kepada kerajaan-kerajaan bawahannya (*vassal*). Kerajaan-kerajaan bawahan yang dimaksud antara lain adalah Banten, Sunda Kalapa, Cirebon, dan Sumedanglarang.

Rupanya, Pemerintah Kolonial Belanda menetapkan luasan dan cakupan wilayah *West Java* ini sangat mempertimbangkan aspek historis, yakni mengacu pada masa Kerajaan Sunda Pajajaran. Oleh karena itu, adalah keliru bila kemudian ada identifikasi “Jawa Barat adalah Sunda; Sunda adalah Jawa Barat”. Identifikasi seperti itu tidak historis. Secara historis, pada kata “Jawa Barat” tidak ada konotasi etnis atau kultur. Etnis dan kultur Sunda hanya identik dengan Priangan; sedangkan Priangan hanyalah salah satu dari keresidenan yang ada di lingkup pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

Alternatif II: 19 Agustus 1945

Dua hari setelah Indonesia merdeka, melalui sidang PPKI (19 Agustus 1945) dihasilkan keputusan dibentuknya 12 departemen dan sekaligus ditunjuk para pemimpin departemen serta ditetapkan pembagian wilayah negara Republik Indonesia. Wilayah Republik Indonesia dibagi atas delapan provinsi yang juga sekaligus ditunjuk gubernurnya (Kartodirdjo *et al.* 1975: 29). Kedelapan provinsi itu adalah: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil (The, 1993: 42).

Alternatif III: 17 Agustus 1950

Karena keberadaan negara federal tidak mendapat dukungan rakyat, maka di banyak daerah timbul pergolakan yang menuntut dibubarkannya negara federal itu, tidak terkecuali Negara Pasundan. Berdasarkan desakan rakyat, Negara Pasundan menyerahkan penyelenggaraan tugas pemerintahannya kepada Pemerintah RIS. Dengan UU Darurat 1950/1, RIS menetapkan bahwa tugas pemerintah itu diselenggarakan oleh Komisaris Pemerintah yang diangkat oleh Presiden RIS. Kemudian, untuk memungkinkan pembubaran suatu negara bagian ditetapkanlah UU Darurat 1950/11 tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan dari wilayah RIS. Berdasarkan UU Darurat ini, Negara Pasundan dibubarkan oleh Presiden RIS dan wilayahnya digabungkan pada Negara Bagian Republik Indonesia (Keputusan 1950/113). Pada tanggal 19 Mei 1950 dicapai persetujuan untuk membentuk negara kesatuan dengan mengubah Konstitusi RIS (pasal-pasal mengenai bentuk federasi dihapus. Pada tanggal 15 Agustus 1950 keluarlah UU RIS 1950/7 tentang perubahan Konstitusi Sementara RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Republik Indonesia (LN 1950/56, TLN 37). UU ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. Pada ulang tahun kelima Proklamasi Kemerdekaan berdirilah Negara Kesatuan RI.

Menjelang terbentuknya NKRI, melalui PP 1950/21 tanggal 14 Agustus 1950, Pemerintah RIS membagi seluruh wilayah Indonesia dalam 10 daerah provinsi yang bersifat administratif (LN 1950/59). Kesepuluh daerah-provinsi itu adalah: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Sunda Kecil (The, 1993: 191-193).

Alternatif Hari Jadi Provinsi Jawa Barat

Dengan menyatakan bahwa “Provinsi Jawa Barat **pertama kali** dibentuk tanggal 1 Januari 1926 pada masa Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Kemudian, sebagai konsekuensi Proklamasi Kemerdekaan RI, Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dibentuk **lagi** tanggal 19 Agustus 1945. Selanjutnya, pada tanggal 14 Agustus 1950 sebagai akibat logis dari perubahan bentuk negara dari negara federal ke negara kesatuan, Provinsi Jawa Barat dibentuk **lagi**”, sesungguhnya tugas sejarawan sudah selesai.

Ketiga alternatif itu adalah fakta sejarah. Adapun mengenai penetapan tanggal mana yang akan dipilih sebagai hari jadi, yang nantinya setiap tanggal itu akan

diperingati, hal tersebut lebih merupakan keputusan “politis”. Mekanisme akhirnya ditetapkan melalui sidang DPRD Provinsi Jawa Barat. Namun demikian, ada baiknya saya menyampaikan, paling tidak, empat kriteria yang sering dijadikan bahan pertimbangan menetapkan hari jadi. Keempat hal itu adalah:

1. Dicari dari kronologi yang setua mungkin.
2. Mampu menimbulkan rasa bangga penduduk dan warga masyarakat.
3. Mempunyai ciri khas atau unik.
4. Bersifat *Indonesia-sentris*, bukannya *Neerlandosentris*.

Berdasarkan kriteria ini, dari ketiga alternatif tanggal di atas (1 Januari 1926, 19 Agustus 1945, dan 17 Agustus 1950) tidak ada yang sepenuhnya cocok. Alternatif tanggal 1 Januari 1926 hanya cocok dengan kriteria nomor 1 dan 3. Alternatif tanggal 19 Agustus 1945 memenuhi kriteria nomor 2 dan 4. Alternatif tanggal 17 Agustus 1950 terkalahkan oleh alternatif kedua. Beberapa kriteria ini pun tentu saja sangat subjektif, terutama untuk nomor 2. Sementara kriteria nomor 4 signifikansinya sangat *debatable*.

Penutup

Melihat kenyataan seperti itu – tidak ada alternatif yang ideal – menuntut kita merenung untuk sejenak berfikir filosofis: apa makna di balik angka tahun yang setua mungkin itu? Apa sesungguhnya yang dibanggakan penduduk dan masyarakat Jawa Barat berkaitan dengan momentum hari jadi itu? Mau apa dengan kekhasan atau keunikan itu? Apa keuntungan praktis dari pilihan Indonesia- atau *Neerlandosentris*?

Inilah yang menarik untuk didiskusikan. Pilihan mana pun yang nantinya akan diambil, tentu saja tidak perlu ada pihak yang merasa menang dan kalah. Namun demikian, sekedar mengusulkan, kiranya tanggal 19 Agustus bisa dipertimbangkan menjadi *moment* untuk diperingati sebagai hari jadi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

Mengambil momentum ini tidak sama sekali berarti menaifkan fakta sejarah 1 Januari 1926 dan 17 Agustus 1950. Secara praktis pun, memperingati hari jadi tanggal 19 Agustus bisa satu paket dengan “hajatan” rutin kenegaraan di tingkat provinsi, yaitu memperingati hari proklamasi kemerdekaan.

Pada akhirnya ingin saya katakan lagi bahwa penetapan hari jadi adalah sebuah keputusan politik. Selain itu, “*agreement*” pun sering dijadikan pertimbangan. Oleh

karena itu, “keputusan politik” yang didasarkan pada “landasan ilmu (sejarah)” dan kemudian “disepakati”, itulah yang akan menjadi Hari Jadi Pemerintah Provinsi Jawa Barat”.

Daftar Sumber

Ekadjati, Edi S. *et al.* 1993.

Sejarah Pemerintahan di Jawa Barat. Bandung: Pemerintahan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Hardjasaputra, A. Sobana. 2010.

“Titimangsa Jawa Barat”, *Pikiran Rakyat*, Sabtu, 24 Juli, hlm. 32.

Kartodirdjo, Sartono *et al.* ed. 1975.

Sejarah Nasional Indonesia. Jilid VI. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Lubis, Niha H. *et al.* 2003.

Sejarah Tatar Sunda Jilid 2. Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran.

Mulyana, Agus. 2010.

“Antara Ideologis dan Sentimen Etnis”, *Pikiran Rakyat*, Sabtu, 24 Juli, hlm. 32.

The, Liang Gie. 1993.

Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia. Jilid I. Edisi kedua. Yogyakarta: Liberti.

**LAMPIRAN:
DAFTAR GUBERNUR JAWA BARAT
TAHUN 1925 – SEKARANG**

Masa Kolonial:

1. W.P. Hilten 1925 - 1929
2. J.B. Hartelust 1929 - 1931
3. C.A. Schmitzler 1931 - 1934
4. L.G.C.H. van der Hoek 1934 - 1942

Masa Republik Indonesia:

5. Sutarjo Kartohadikusumo 19 Agust. 1945 - Des. 1945
6. Mr. Datuk Jamin Des.1945 - Juni 1946
7. Dr. Murjani Juni 1946 - Maret 1947
8. M. Sewaka 1 April 1947 - 1948
9. Ir. Ukar Bratakusumah Des. 1948 - 1950
10. M. Sewaka 1950 - 1952
11. Sanusi Harjadinata 1952 - 1956
12. R. Ipik Gandamana 1956 - 1960
13. Mashudi 1960 - 1970
14. Solihin G.P. 1970 - 1975
15. Aang Kunaefi 1975 - 1985
16. Yogie S. Memet 1985 - 1990
17. Yogie S. Memet 1990 - 1993
18. R. Nuriana 1993 - 1998
19. R. Nuriana 1998 - 2003
20. Danny Setiawan 2003 - 2008
21. Ahmad Heriawan 2008 - 2013